



PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA KOTA MAKASSAR

Misfah Muslimawati¹, H.Thamrin Tahir², Muhammad Rakib³

Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

e-mail; misfah.ifah@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) pengaruh langsung pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak, 2) pengaruh langsung pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, 3) pengaruh tidak langsung pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak badan dengan jumlah sampel 325 responden. Teknik analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah teknik random sampling dan analisis path. Data penelitian yang dikumpulkan melalui kuisioner dengan kategori sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengetahuan pajak berpengaruh langsung positif dan signifikan sebesar 0,263 dan sanksi pajak berpengaruh langsung positif dan signifikan sebesar 0,337 terhadap kesadaran wajib pajak. 2) pengetahuan pajak berpengaruh langsung positif dan signifikan sebesar 0,122, sanksi pajak berpengaruh langsung positif dan signifikan sebesar 0,342, kesadaran wajib pajak berpengaruh langsung positif dan signifikan sebesar 0,192 terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 3) pengetahuan pajak berpengaruh tidak langsung dan positif sebesar 0,05 dan sanksi pajak berpengaruh tidak langsung dan positif sebesar 0,06 terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui kesadaran wajib pajak.

Kata kunci: pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak badan

ABSTRACT

This study aims to analyze: 1) the direct influence of tax knowledge, tax sanctions on taxpayer awareness, 2) the direct influence of tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness on corporate taxpayer compliance, 3) indirect influence on tax knowledge and tax awareness towards taxpayer compliance through taxpayer awareness. This study uses a quantitative descriptive approach. The sample of this study was a corporate taxpayer with a sample of 325 respondents. The technical data analysis used in this research is incidental sampling and path analysis techniques. Research data collected through questionnaires with categories strongly agree, agree, disagree, disagree and strongly disagree. Based on the results of the study indicate that: 1) knowledge of tax has a positive and significant direct effect of 0.263 and tax tax sanctions have a positive and significant direct effect of 0.337 on taxpayer awareness. 2) tax knowledge has a positive and significant direct effect of 0.122, tax sanctions have a positive and significant direct effect of 0.342, awareness of taxpayers has a positive and significant direct effect of 0.192 on corporate taxpayer compliance. 3) knowledge of indirect and positive tax effects of 0.05 and tax sanctions indirect and positive effect of 0.06 on corporate taxpayer compliance through taxpayer awareness.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, The Corporate Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Pembangunan akan berjalan dengan lancar jika penerimaan negara dikelola dengan baik sedangkan diketahui bahwa biaya pembangunan sebahagian besar bersumber dari pendapatan pajak.

Saat ini, pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin pembangunan nasional tanpa tergantung pada sumber daya alam dan bantuan asing. Hal ini sejalan dengan pandangan Fjeldstad (2013) sistem pajak yang efektif akan mampu menggerakkan roda pembangunan untuk dapat Pajak sendiri merupakan iuran berasal dari rakyat untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri, pajak direalisasikan dalam bentuk belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan yang dibuat dalam Anggaran Pembiayaan dan Negara (APBN).

Pajak dan APBN mempunyai hubungan yang saling berkaitan, dimana Pajak merupakan salah satu sumber dana untuk menentukan besarnya anggaran pembelanjaan negara. Lewat APBN, pemerintah merancang proyek pembangunan berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan secara menyeluruh dengan mengganti Official Assessment System menjadi Self Assessment System.

Dengan mengganti sistem per-pajakan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, sehingga penerimaan pajak negara juga dapat meningkat. Oleh karena itu, agar penerimaan pajak meningkat wajib pajak harus patuh akan kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh wajib pajak yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan meliputi perhitungan pajak terutang, penyeteroran pajak terutang, dan pelaporan pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan baik apabila setiap tahunnya wajib pajak melakukan kewajibannya

secara benar (Ginting, 2015). Selain itu, faktor yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara (Jatmiko, 2006).

Menurut Hariyanto (2006) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Pengetahuan Wajib Pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menem-puh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009).

Selain masalah kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak, diperlukan juga sanksi dan penegakan hukum yang memadai. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh penegakan hukum perpajakan melalui diterapkannya sanksi perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Berdasarkan latar belakang diatas, yang telah dikemukakan maka peneliti terinovasi untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar”.

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pohan (2013) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

John S. Edward (1932) mengungkapkan untuk meningkatkan pendapatan pajak banyak upaya yang dilakukan diantaranya membatasi kertas kerja untuk tiga divisi utama pajak yaitu mesin penilaian (sistem prosedur pajak yang terkontrol), pemisahan pendapatan (memisahkan antara pendapatan pajak dan pendapatan yang

tidak kena pajak) dan perubahan konstitusi (peraturan dan kebijakan pajak yang mengarah ke penekanan pajak).

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus ditanggung dan dibayarkan kepada negara. Orang yang mempunyai tanggung jawab pajak, harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada dasarnya terdapat tiga sistem yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak terutang oleh seseorang.

Wajib Pajak Badan

Wajib pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah, “orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 berbunyi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak

Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 berbunyi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ginting (2015) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh wajib pajak yang berdasarkan undang-undang perpajakan meliputi perhitungan pajak terutang, penyeteroran pajak terutang, dan pelaporan pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan baik apabila setiap tahunnya wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara benar.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud

adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2016). Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi dimana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ransangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat ukur menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) Untuk menganalisis pengaruh langsung pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar; (2) Untuk menganalisis pengaruh langsung pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar; (3) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Santoso (2012) menjelaskan pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan

penelitian dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menyebarkan angket berupa survey questionery dalam bentuk pernyataan-pernyataan secara terstruktur yang setiap responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja.

Metode Analisis Data

Analisis yang dilakukan untuk data penelitian adalah path analysis atau analisis jalur untuk mengetahui ada pengaruh langsung atau tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengaruh tidak langsung suatu independen variabel terhadap dependen variabel

adalah melalui variabel yang lain yang disebut variabel antara (intervening variable).

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar yang beralamat di Jln Urip Sumoharjo Km.4. Penyebaran serta pengembalian kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019.

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya, akan dilakukan deskripsi penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai jawaban dari masing-masing responden atas pernyataan yang diajukan pada saat penelitian.

Tabel. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis		Kisaran Empiris		Mean	Median	Str. Deviasi
		Min	Max	min	max			
Pengetahuan Pajak	325	41	60	3,15	4,62	4,081	4,080	0,2502
Sanksi Pajak	325	28	39	3,50	4,88	4,084	4,000	0,2824
Kesadaran Wajib pajak	325	27	34	3,86	4,86	4,140	4,140	0,1885
Kepatuhan wajib pajak badan	325	32	44	3,56	4,89	4,149	4,110	0,2273
Valid N (Listwise)	325							

Tabel tersebut menunjukkan hasil uji statistik deskriptif variabel-variabel penelitian. Jumlah sampel yang didapatkan dalam penelitian ini sebanyak 325 sampel dan semuanya valid untuk digunakan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan tabel 4.6 menjelaskan hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

- 1) Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai kisaran teoritis 41-60 dan kisaran empiris 3,15-4,62, mean 4,081 dan standar deviation 0,2502. Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai mean lebih tinggi dari nilai mediannya yaitu $4,081 > 4,080$. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki persepsi tingkat pengetahuan mengenai pajak yang cukup tinggi.
- 3) Variabel sanksi Pajak memiliki nilai kisaran teoritis 29-38 dan kisaran empiris 3,50-4,88, mean 4,084 dan standar deviation 0,2824. Variabel sanksi pajak memiliki nilai mean lebih tinggi dari nilai mediannya yaitu $4,084 >$

4,000. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki tingkat persepsi atas pajak yang tinggi.

- 4) Variabel kesadaran Pajak memiliki nilai kisaran teoritis 27-34 dan kisaran empiris 3,86-4,86, mean 4,140 dan standar deviation 0,1885. Variabel kesadaran pajak memiliki nilai mean sama dengan nilai mediannya yaitu $4,140 = 4,140$. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki kesadaran pajak.
- 4) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki nilai kisaran teoritis 32-44 dan kisaran empiris 3,56-4,89, mean 4,149 dan standar deviation 0,2273. Variabel kesadaran pajak memiliki nilai mean lebih tinggi dari nilai mediannya yaitu $4,149 > 4,110$. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki tingkat persepsi Kepatuhan Pajak yang tinggi.

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hipotesis Pertama: Hubungan Kausal Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y1) di KPP Madya Makassar.

Berdasarkan data penelitian yang diolah menggunakan bantuan komputer program IBM SPSS Statistics 24, untuk hasil pengujian struktur 1 diperoleh koefisien Beta $py1x1$ ($X1$) = 0,263 (t -hitung = 5,204 yang besar dari t -tabel = 1,967 dan probabilitas (sig) = 0,000 yang lebih kecil dari α 0,05). Karena nilai t -hitung lebih besar dari nilai t -tabel ($5,204 > 1,967$) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi standar α 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka hipotesis H_0 ditolak dan **H1 diterima**.

Angka koefisien Beta sebesar 0,263 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberi kontribusi sebesar 26,3% dalam menjelaskan variasi kesadaran wajib pajak badan di KPP Madya Makassar.

2. Hipotesis kedua: Hubungan kausal sanksi pajak (X2) terhadap kesadaran wajib pajak (Y1) di KPP Madya Makassar.

Berdasarkan data penelitian yang diolah menggunakan bantuan komputer program IBM SPSS Statistics 24, untuk hasil pengujian struktur 1 diperoleh koefisien Beta $py1x2$ ($X2$) = 0,337 (t -hitung = 6,671 yang besar dari t -tabel = 1,967 dan probabilitas (sig) = 0,000 yang lebih kecil dari α 0,05). Karena nilai t -hitung lebih besar dari nilai t -tabel ($6,671 > 1,967$) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi standar α 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka hipotesis H_0 ditolak dan **H1 diterima**.

3. Hipotesis Ketiga : Hubungan Kausal Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y2) di KPP Madya Makassar.

Berdasarkan data penelitian yang diolah menggunakan bantuan komputer program IBM SPSS Statistics 24, untuk hasil pengujian struktur 2 diperoleh koefisien Beta $py2x1$ ($X1$) = 0,122 (t -hitung = 2,362 yang besar dari t -tabel = 1,967 dan probabilitas (sig) = 0,019 yang lebih kecil dari α 0,05). Karena nilai t -hitung lebih besar dari nilai t -tabel ($2,362 > 1,967$) dan nilai signifikansi 0,019 lebih kecil dari nilai signifikansi standar α 0,05 ($0,019 < 0,05$) maka hipotesis H_0 ditolak dan **H1 diterima**.

Angka koefisien Beta sebesar 0,122 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberi kontribusi sebesar 12,2% dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Makassar.

4. Hipotesis Keempat : Hubungan Kausal Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y2) di KPP Madya Makassar.

Berdasarkan data penelitian yang diolah menggunakan bantuan komputer program IBM SPSS Statistics 24, untuk hasil pengujian struktur 2 diperoleh koefisien Beta $py2x2$ ($X2$) = 0,342 (t -hitung = 6,454 yang besar dari t -tabel = 1,967 dan probabilitas (sig) = 0,000 yang lebih kecil dari α 0,05). Karena nilai t -hitung lebih besar dari nilai t -tabel ($6,454 > 1,967$) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi standar α 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka hipotesis H_0 ditolak dan **H1 diterima**.

Angka koefisien Beta sebesar 0,342 menunjukkan bahwa sanksi pajak memberi kontribusi sebesar 34,2% dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Makassar.

5. Hipotesis Kelima : Hubungan Kausal Kesadaran Wajib Pajak (Y1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y2) di KPP Madya Makassar.

Berdasarkan data penelitian yang diolah menggunakan bantuan komputer program IBM SPSS Statistics 24, untuk hasil pengujian struktur 2 diperoleh koefisien Beta $py2y1$ ($Y1$) = 0,192 (t -hitung = 3,507 yang besar dari t -tabel = 1,967 dan probabilitas (sig) = 0,001 yang lebih kecil dari α 0,05). Karena nilai t -hitung lebih besar dari nilai t -tabel ($3,507 > 1,967$) dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari nilai signifikansi standar α 0,05 ($0,001 < 0,05$) maka hipotesis H_0 ditolak dan **H1 diterima**.

Angka koefisien Beta sebesar 0,192 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memberi kontribusi sebesar 19,2% dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Makassar.

6. Hipotesis Keenam : Hubungan Kausal Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y2) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Y1) di KPP Madya Makassar.

Berdasarkan data penelitian yang diolah menggunakan bantuan komputer program IBM SPSS Statistics 24, untuk hasil pengujian struktur 1 dan struktur 2 diperoleh koefisien pengaruh tidak langsung pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui kesadaran wajib pajak sebesar $0,263 \times 0,192 = 0,05$. Suatu hubungan tidak langsung dikatakan signifikan apabila nilai koefisien lebih besar dari 0,08 (Hair, J.f., et al, dkk. 1992).

Sedangkan pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y2 sebesar 0,122, maka pengaruh totalnya adalah $0,05 + 0,122 = 0,172$

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui kesadaran wajib pajak di KPP Madya Makassar, maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima.

Angka koefisien Beta sebesar 0,05 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberi kontribusi sebesar 5% dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak badan melalui kesadaran wajib pajak di KPP Madya Makassar.

7. Hipotesis Ketujuh : Hubungan Kausal Sanksi Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y2) melalui Kesadaran Wajib Pajak (Y1) di KPP Madya Makassar.

Berdasarkan data penelitian yang diolah menggunakan bantuan komputer program IBM SPSS Statistics 24, untuk hasil pengujian struktur 1 dan struktur 2 diperoleh koefisien pengaruh tidak langsung sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui kesadaran wajib pajak sebesar $0,337 \times 0,192 = 0,06$. Suatu hubungan tidak langsung dikatakan signifikan apabila nilai koefisien lebih besar dari 0,08 (Hair, J.f., et al, dkk. 1992).

Sedangkan pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Y2 sebesar 0,342, maka pengaruh totalnya adalah $0,06 + 0,342 = 0,402$

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui kesadaran wajib pajak di KPP Madya Makassar, maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima.

Angka koefisien Beta sebesar 0,06 menunjukkan bahwa sanksi pajak memberi kontribusi sebesar 6% dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak badan melalui kesadaran wajib pajak di KPP Madya Makassar.

B. PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dikemukakan pembahasan yang fokus pada hasil pengujian hipotesis yang akan memberikan jawaban atas perumusan masalah penelitian. Pembahasan setiap hasil pengujian hipotesis dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Hasil penelitian untuk hipotesis pertama yaitu pengetahuan membayar pajak berpengaruh

positif terhadap niat kepatuhan pajak, dengan nilai $\text{sig sig } (0,000) > \alpha (0,05)$ dan koefisien regresi Beta sebesar 0,263. Hal ini sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Pancawati Hardiningsih (2011), dari hasil penelitiannya menunjukkan pengetahuan dan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Artinya Pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang manfaat pajak yang dibayarkan untuk kepentingan publik secara otomatis wajib pajak akan memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena Wajib Pajak mengetahui pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga Wajib Pajak tidak merasa dirugikan atas pajak yang sudah dibayarkan. Ketika pengetahuan Wajib Pajak meningkat, maka hal ini akan memberikan dorongan positif dari dalam diri Wajib Pajak yang selanjutnya membentuk kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak.

Hasil penelitian untuk hipotesis kedua yaitu sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, dengan nilai $\text{sig } (0,000) > \alpha (0,05)$ dan arah koefisien regresi Beta sebesar 0,337. Hal ini sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Yadyana (2011), dari hasil penelitiannya menunjukkan pengetahuan dan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Artinya Sanksi pajak diterapkan agar wajib pajak dapat memperhatikan pembayaran dan pelaporan pajak dengan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Jika wajib pajak yakin bahwa sanksi pajak merupakan beban perusahaan karena adanya pengenaan denda yang sudah diatur oleh undang-undang perpajakan, maka wajib pajak membayar pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan sanksi pajak tidak perlu lagi memberatkan Wajib Pajak.

3. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian untuk hipotesis ketiga yaitu pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dengan nilai $\text{sig } (0,019) < \alpha (0,05)$ dan arah koefisien regresi Beta sebesar 0,122, hal ini sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh titis wahyu Adi (2018), dari hasil penelitiannya menunjukkan

pengetahuan dan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Artinya jika wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik dan mengetahui fungsi dari pajak yang mereka bayarkan yaitu sebagai penunjang pembangunan nasional, oleh karena itu, tingkat pengetahuan pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian untuk hipotesis ketiga yaitu sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai sig (0,000) > α (0,05) dan arah koefisien regresi Beta sebesar 0,342, hal ini sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Titis Wahyu Adi (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas oleh pemerintah akan membuat wajib pajak patuh karena mereka sadar akan adanya hukum perpajakan dan konsekuensi apabila melanggar hukum tersebut berupa kerugian secara material (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Artinya, penerapan Denda administrasi dan pidana yang diterapkan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak di KPP Madya Makassar. Hal ini, dikarenakan, semakin tinggi pelanggaran maka akan semakin besar sanksi yang diberikan, dengan mempertimbangkan konsekuensi tersebut maka Wajib Pajak akan lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya.

5. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian untuk hipotesis ketiga yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, dengan nilai sig (0,001) > α (0,05) dan arah koefisien regresi Beta sebesar 0,192, hal ini sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Tryana A.M. Tiraada (2013) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Artinya wajib pajak memiliki keyakinan bahwa pajak yang disetornya akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik maka wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Sehingga kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pajak yang telah dibayarkan kepada negara akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur baik itu kota maupun daerah yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak

Hasil penelitian untuk hipotesis keenam yaitu bahwa pengetahuan pajak mempunyai pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak, dengan nilai koefisien regresi Beta sebesar 0,05 (5%), dan pengaruh langsungnya sebesar 0,122 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsungnya lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung.

Dalam teori bakti seperti yang diungkapkan oleh Brotodiharjo (2013) dalam teorinya tentang bakti menyatakan bahwa Negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakatnya, masyarakat menyadari bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara agar pemerintahan negara berjalan dengan baik dan lancar. Artinya, perwujudan bakti kepada negara akan terlaksana dengan baik jika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum perpajakan.

Pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berbanding lurus terhadap kesadaran wajib pajak. Adanya peranan aktif wajib pajak terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak saat ini sudah meningkat sehingga kesadaran wajib pajak pun meningkat.

7. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

Hasil penelitian untuk hipotesis keenam yaitu bahwa pengetahuan pajak mempunyai pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak, dengan nilai koefisien regresi Beta sebesar 0,06 (6%) dan pengaruh langsungnya sebesar 0,342 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsungnya lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung.

Sanksi pajak diterapkan agar dapat mendisiplinkan wajib pajak karena pajak dibayarkan akan dinikmati oleh wajib pajak itu sendiri melalui pembangunan infrastruktur karena pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini sejalan dengan teori kepentingan seperti yang diungkapkan oleh Brotodiharjo (2013) dalam

teori kepentingan ini diibaratkan dua pihak saling membutuhkan dan menguntungkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan jika sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak berbanding lurus terhadap kesadaran wajib pajak, pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana sudah memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak percaya bahwa semakin tinggi tingkat pelanggaran maka akan semakin besar sanksi yang diberikan, dengan mempertimbangkan konsekuensi tersebut maka Wajib Pajak akan lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya sehingga timbul kesadaran wajib itu sendiri.

C. SIMPULAN

1. Terdapat pengaruh langsung antara pengetahuan dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib. Ditunjukkan dengan koefisien korelasi pengetahuan pajak ($PX1Y1$) = 0,263 dan nilai sig α 0,05 ($0,000 < 0,05$), sedangkan dengan koefisien korelasi sanksi pajak $PX2Y1$ = 0,337 dan dengan nilai sig ($0,000 > \alpha$ (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberi kontribusi sebesar 26,3% dan sanksi pajak memberikan kontribusi sebesar 33,7% terhadap kesadaran wajib pajak dan dapat dikatakan bahwa hubungan pengetahuan pajak dan sanksi pajak positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.
2. Terdapat pengaruh langsung antara pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ditunjukkan dengan koefisien korelasi pengetahuan pajak ($PX1Y2$) = 0,122 dan nilai sig ($0,019 < \alpha$ (0,05), koefisien korelasi sanksi pajak ($PX2Y2$) = 0,342 dan dengan nilai sig ($0,000 > \alpha$ (0,05) dan koefisien korelasi sanksi pajak ($PY1Y2$) = 0,192. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberi kontribusi sebesar 12,2%, sanksi pajak memberikan kontribusi sebesar 34,2% dan kesadaran wajib pajak memberi kontribusi sebesar 19,2% terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib badan.
3. Terdapat pengaruh tidak langsung antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui kesadaran wajib pajak dan hasil analisis path menunjukkan koefisien

sebesar 0,05 atau 5% dan sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui kesadaran wajib pajak dan hasil analisis path menunjukkan koefisien sebesar 0,06 atau 6% menunjukkan pengaruh tidak langsung yang signifikan kepatuhan wajib pajak badan dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening (mediator) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan kepatuhan wajib pajak badan dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening (mediator), hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh tidak langsung secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib badan melalui kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith . 1776. "*An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations*" dalam Mark Skusen (2005); Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern, Jakarta Prenada.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Sigma Alpha.
- Carolina, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brotodiharjo, R Santoso. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Refika Aditama.
- Edwin R.A. Seligman. 1905. *Essay in Taxation*. New York. Macmilan.
- Fasmi, Lasnafa dan Fauzan Misra. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang.Simposium Nasional Akuntansi 15.
- Gardina, Trisia dan Haryanto Dedy 2006. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Modus Vol. 18 No. 1 hh. 10-28.
- Ginting, Ari Mulianta. 2015. Strategi Perpajakan 2015, Jurnal Vol.VII No. 03/I/P3DI/Februari 2015.
- Hair, Jr., J.F., R.E Anderson, R.L Thantham and W.C Black. 1992. *Multivariate Data*

- Analysis With Reading.* New York: Macmillan Pub. Company.
- Halim, Abdul, dkk. (2014). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jatmiko, A.N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- John S. Edwards. 1932. A Quarter Century Of Tax History. Proceedings of the Annual Conference on Taxation under the Auspices of the National Tax Association Vol. 25, 6 Hal.
- Kurniawan, Heru. 2009. *Sastra Anak Dalam Kajian Strukturalisme, Sosiologi Hingga Penulisan Kreatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Lillian F. Mills. 1996. Corporate Tax Compliance And Financial Reporting. National Tax Journal Vol. 49, No. 3, 15 Hal.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. Pengaruh sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris di kantor pajak pratama jakarta kembangan). Jurnal Akuntansi Volume XIX No.02, 26 Hal.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Malhotra, N.K. dan Birks, D.F. 2007. *Marketing Research: An Applied Approach, 3rd European Edition*. Harlow. UK: Pearson Education.
- Mellisa, Mienati. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Jurnal Ekonomi dan Bisnis No.2 Agustus 2014 Universitas Airlangga
- Muchsin Ihsan. 2009. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. Jurnal Akuntansi UNP.
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Udayana Vol.6 No.1 Januari 2011.
- Pancawati Hardiningsih. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol 3, No.1:126-142.
- Widowati, Rizky. 2014. Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus. Tesis Universitas Dian Nuswantoro Semarang - Fakultas Ekonomi & Bisnis
- Yadnyana. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya. Vol. 12. No. 2.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.